

Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Farida Nur Aini
Nomor Mahasiswa : 20313188
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Farida Nur Aini
Nomor Mahasiswa : 20313188
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Maret 2024

Penulis,



Farida Nur Aini

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022

Nama : Farida Nur Aini
Nomor Mahasiswa : 20313188
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 28 Februari 2024
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen pembimbing,



Suharto, S.E., M.Si.

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022

Disusun oleh : FARIDA NUR AINI

Nomor Mahasiswa : 20313188

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 26 Maret 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Dr. Drs. Unggul Priyadi, M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA
Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.” (HR. Tirmidzi)

七転び八起き

“Nanakorobi Yaoki”

Artinya: jatuh tujuh kali, bangkit delapan kali

الجامعة الإسلامية
الإسلامية

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta memberi kelancaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti syafa'atnya di Yaumul Akhir Aamiin.

Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua tercinta Bapak Widodo dan Ibu Martini atas semua dukungan berupa doa, semangat, kasih sayang yang telah diberikan untuk peneliti selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak tercinta Sepnu Setyawan Nugroho yang terus memberi dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Pasangan peneliti, Rony Aldiyan Saputra yang terus memberi dukungan, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini serta selalu membantu kelancaran skripsi ini dengan mengantarkan peneliti untuk bimbingan skripsi.
4. Sahabat dan teman-teman peneliti yang selalu memberi bantuan serta dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022”. Sholawat serta salam serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti syafa'atnya di Yaumul Akhir Aamiin. Tersusunnya skripsi ini merupakan salah satu kebahagiaan penulis serta merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan program studi Sarjana strata satu (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, yang disebabkan oleh keterbatasan peneliti dan faktor-faktor lain, sehingga masih jauh mencapai tingkat kesempurnaan. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan saran. Dengan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, peneliti tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, dengan tulus peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. sebagai Dekan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. sebagai Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. Sebagai Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.zec., Ph.D. yang berperan sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Suharto, S.E., M.Si. yang menjadi Dosen Pembimbing Skripsi dengan penuh kesabaran dan perhatian serta memberi dukungan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Orang tua tercinta Bapak Widodo dan Ibu Martini atas semua dukungan berupa doa, semangat, kasih sayang dan semua baik berupa moril maupun materil yang telah diberikan untuk peneliti selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kakak tercinta Sepnu Setyawan Nugroho yang terus memberi dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Pasangan peneliti, Rony Aldiyan Saputra yang terus memberi dukungan, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini serta selalu membantu kelancaran skripsi ini dengan mengantarkan peneliti untuk bimbingan skripsi.
10. Sahabat-sahabat peneliti, Ika Septia Wardani, Nabila Ariini Rosyada, Salma Kholida Nouvajriya, Alfinda Agsatie Rahmayanti dan Oktaria Dwi Nur'aini yang selalu memberi semangat, bantuan, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman yang selalu memberi bantuan serta dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung peneliti. Peneliti berdoa semoga semua pihak diberikan balasan dari Allah SWT atas bantuan dan doanya. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wallahulmuwafiq ilaaqnamiththarieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 29 Februari 2024



Farida Nur Aini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1. Kajian Pustaka.....	10
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1. Kemiskinan	14
2.2.2. Dana Keistimewaan (DAIS)	18
2.2.3. Dana Alokasi Umum (DAU).....	19
2.2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)	20
2.2.5. Dana Bagi Hasil (DBH)	21
2.2.6. Pengaruh Antar Variabel.....	22
2.3. Kerangka Pemikiran.....	23
2.4. Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25

3.1.	Jenis dan Sumber Data	25
3.2.	Definisi Operasional Variabel.....	26
3.2.1.	Variabel Dependen	26
3.2.2.	Variabel Independen.....	26
3.3.	Metode Analisis Data.....	27
3.3.1.	Estimasi Regresi Data Panel	27
3.3.2.	Pemilihan Model.....	28
3.4.	Uji Statistik.....	29
3.4.1.	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	29
3.4.2.	Uji Parsial T.....	30
3.4.3.	Koefisien Determinasi (R-Squared).....	30
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		32
4.1.	Deskripsi Data Penelitian	32
4.2.	Statistik Deskriptif.....	32
4.3.	Hasil Analisis dan pembahasan	35
4.3.1.	Estimasi Regresi Data Panel	35
4.3.2.	Pemilihan Model Regresi.....	36
4.4.	Model Regresi Terbaik.....	37
4.4.1.	Uji Statistik	38
4.4.2.	Pembahasan	41
4.4.3.	Analisis Intersep	44
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....		47
5.1.	Kesimpulan.....	47
5.2.	Implikasi.....	47
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN.....		51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka	13
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif	32
Tabel 4.2 Common Effect	35
Tabel 4.3 Fixed Effect	35
Tabel 4.4 Random Effect	36
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	37
Tabel 4.7 Fixed Effect	38
Tabel 4.8 Cross Section Fixed Effect	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2022 (Persen).....	2
Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Persen).....	5
Gambar 1.3 Pagu Dana keistimewaan D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah) ...	5
Gambar 1.4 Gambar 1.4 DAU, DAK dan DBH D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah).....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Data Penelitian.....	51
Lampiran II. Statistika deskriptif.....	52
Lampiran III. Common Effect	53
Lampiran IV. Fixed Effect.....	54
Lampiran V. Random Effect.....	55
Lampiran VI. Hasil Uji Chow	56
Lampiran VII. Hasil Uji Hausman.....	57
Lampiran VIII. Cross Section Fixed Effect	58



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menambah variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan bantuan Eviews 10.

Hasil penelitian menunjukkan Dana Keistimewaan (DAIS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Kata Kunci: Kemiskinan, Dana Keistimewaan, DAU, DAK, DBH

BAB I

PENDAHULUAN

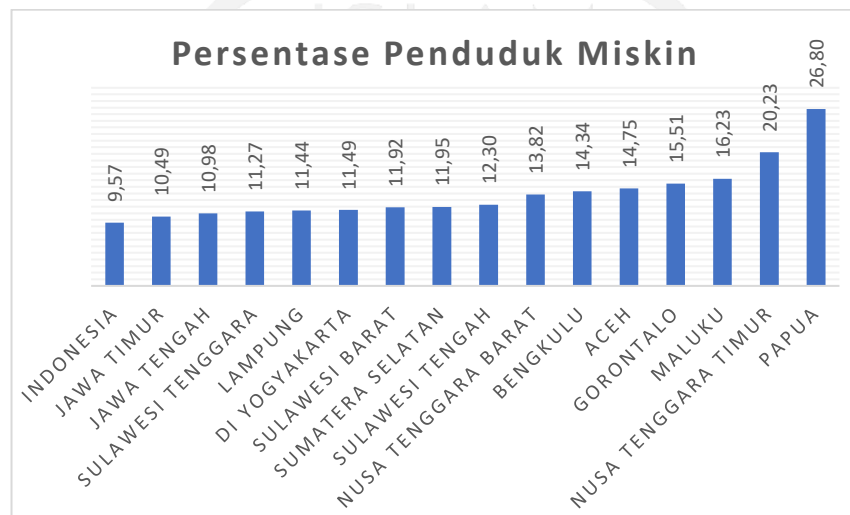
1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada masalah kemiskinan yang menjadi salah satu isu di berbagai negara. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana ketidakmampuan seseorang dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2011). Menurut Ritonga (2003), Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehidupan serba kekurangan yang terjadi pada diri sendiri dan rumah tangga sehingga kebutuhan minimal layak bagi kehidupannya tidak terpenuhi.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang bersifat multidimensional yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Kemiskinan di negara berkembang menjadi permasalahan yang sulit dihadapi, karena kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan bertambahnya biaya untuk pembangunan ekonomi, sehingga secara tidak langsung pembangunan ekonomi akan terhambat. Oleh karena itu, Indonesia yang merupakan negara berkembang mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan. Dalam upaya tersebut pemerintah mulai memberikan perhatian kewenangan kepada pemerintah daerah yang diatur pada UU No. 23 tahun 2014. Dalam UU tersebut Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pelayanan serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing, hal ini dilakukan untuk mendukung berjalannya otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer fiskal.

Kebijakan fiskal melalui sistem transfer daerah atau transfer fiskal telah berlangsung selama 20 tahun dan diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, namun kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut ternyata belum sepenuhnya mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih terus menghantui Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah UU baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2022 sebagai pengganti UU No. 33 Tahun 2004. UU

HKPD ini diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya UU ini diharapkan adanya desentralisasi fiskal melalui sistem transfer ke daerah mampu menyejahterakan masyarakat, sehingga kemiskinan di setiap daerah dapat menurun. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Semester 2 (September) tahun 2022, beberapa provinsi masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi melebihi persentase tingkat kemiskinan Nasional. Berikut data tingkat kemiskinan provinsi yang melebihi persentase kemiskinan nasional Semester 2 (September) tahun 2022 yang ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. (Diolah)

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2022 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1, persentase kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi, angka tersebut berada pada persentase 9,57%. Persentase tersebut menurun 0,14% dari tahun 2021 Semester 2 (September) yaitu sebesar 9,71%. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, jumlah tersebut menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, persentase kemiskinan nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa D.I Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki nilai kemiskinan lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional

yaitu 11,49%. D.I Yogyakarta juga merupakan provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.

D.I Yogyakarta merupakan provinsi yang memperoleh tambahan transfer dana atau dana keistimewaan dari pemerintah pusat yang dimulai sejak tahun 2013, karena merupakan salah satu provinsi yang dianggap memiliki keistimewaan yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain. Keistimewaan tersebut diberikan kepada D.I Yogyakarta karena mempunyai peran dan kontribusi yang besar dalam menjaga, menyempurnakan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dengan melihat kondisi masyarakat D.I Yogyakarta, mereka dapat berintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia yang majemuk yang meliputi adat istiadat, agama, dan bahasa, menjunjung tinggi keberagaman yang tertuang dalam Pancasila.

Negara mengakui serta menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta. Menurut UU tersebut pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa D.I Yogyakarta merupakan provinsi yang mempunyai hak keistimewaan untuk mengurus urusan pemerintahan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada angka 2 juga dijelaskan bahwa keistimewaan merupakan kedudukan hukum yang dimiliki D.I Yogyakarta berdasarkan sejarah dan asal usulnya. Bentuk pengakuan negara terhadap keistimewaan D.I Yogyakarta yang lain adalah dengan pengalokasian Dana Keistimewaan (DAIS). Dana Keistimewaan (DAIS) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan D.I Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta.

Tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5, yaitu untuk mencapai tujuan sebagai berikut: (i) mencapai pemerintahan yang demokratis; (ii) mencapai kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat; (iii) mewujudkan tata kelola pemerintahan dan ketertiban masyarakat yang menjamin kesatuan dalam keberagaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iv) membangun pemerintahan yang baik; dan (v) melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kerajaan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

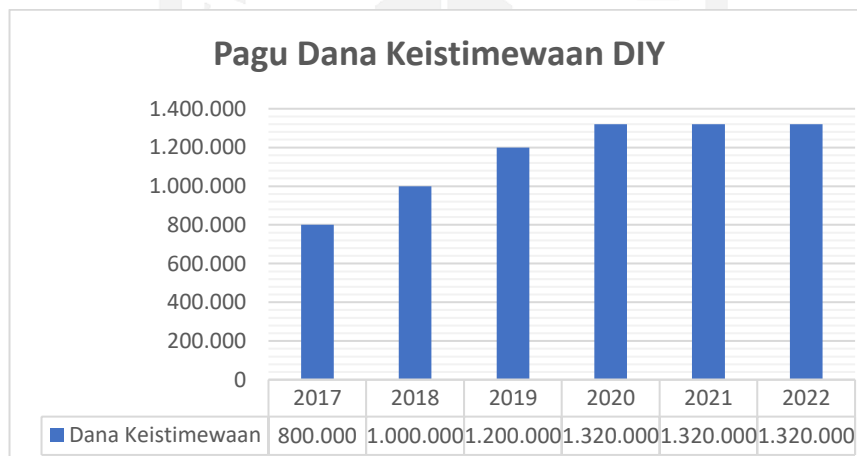
Di antara beberapa tujuan Dana Keistimewaan yang ada, kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan utama. Kesejahteraan dapat diukur melalui penurunan kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi kesejahteraan penduduk (Aryanto, 2019). Dana Keistimewaan yang diberikan untuk masyarakat berupa bantuan langsung maupun tidak langsung yang biasanya disebut dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan. BKK Dana Keistimewaan yang secara tidak langsung digunakan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dialokasikan dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya dengan pembentukan Rintisan Kalurahan Budaya. Rintisan Kalurahan Budaya merupakan kalurahan yang memiliki kewenangan untuk mempertahankan kelestarian budaya yang menyasar para pelaku budaya, kelompok budaya, serta masyarakat setempat untuk mengembangkan budaya di daerah tersebut, dengan harapan mampu mendorong perekonomian masyarakat yang juga akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan. BKK Dana Keistimewaan juga diberikan secara langsung kepada masyarakat, dengan cara pemerintah daerah menyewa tanah kas desa untuk diberikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama warga miskin dengan harapan mampu mendorong perekonomian masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

BKK Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DIY dalam beberapa program dan kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, sistem drainase, dll), pengembangan pendidikan (pembangunan sarana pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pendidikan), peningkatan layanan kesehatan (pembangunan fasilitas kesehatan, perawatan medis, program kesehatan masyarakat, dan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan), pemeliharaan budaya dan tradisi (pemugaran candi, pendukung seni dan budaya tradisional dan pengembangan pariwisata budaya), serta pengembangan sektor ekonomi lokal (pendanaan usaha mikro kecil menengah, pelatihan kewirausahaan dan mendukung program-program pengentasan kemiskinan). Oleh karena itu, pagu dana keistimewaan yang diberikan terus meningkat dengan harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dengan mengentaskan kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. (Diolah)

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Persen)

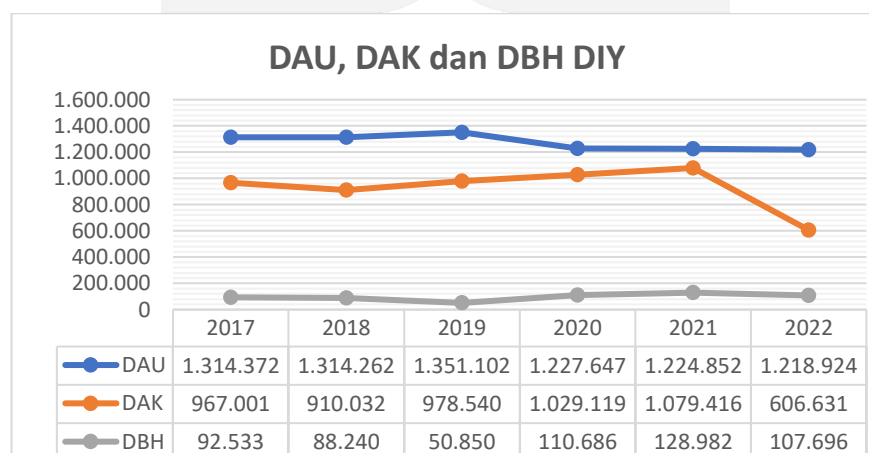


Sumber: Bappeda D.I Yogyakarta, 2024. (Diolah)

Gambar 1.3 Pagu Dana keistimewaan D.I Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.2 dan 1.3, persentase kemiskinan D.I Yogyakarta menurun setiap tahunnya dan pagu Dana Keistimewaan yang diperoleh mengalami peningkatan pada tahun 2018-2020, secara tidak langsung dapat diartikan bahwa tingkat alokasi Dana Keistimewaan yang terus meningkat dapat mengurangi kemiskinan yang ada di provinsi D.I Yogyakarta. Mengingat bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keistimewaan sebagaimana dijelaskan Undang-Undang nomor 13 Pasal 5 Tahun 2012 yang bertujuan untuk “Mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat”.

Selain Dana Keistimewaan (DAIS), terdapat beberapa dana lain yang termasuk dana yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk daerah. Salah satu dana yang diperoleh tersebut yaitu Dana Perimbangan. Dana Perimbangan meliputi (i) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah., (ii) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah, dan (iii) Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Besaran dana perimbangan yang diperoleh Provinsi D.I Yogyakarta yang terus bertambah diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan. Sejak tahun 2001 adanya desentralisasi fiskal, dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga perannya dalam desentralisasi fiskal sangat penting. Berikut perkembangan DAU, DAK dan DBH D.I Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2017-2022.



Sumber: Bappeda D.I Yogyakarta, 2024. (Diolah)

**Gambar 1.4 Gambar 1.4 DAU, DAK dan DBH D.I Yogyakarta
Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.4, DAU, DAK dan DBH mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017-2019 DAU mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada tahun 2020-2022. DAK mengalami kenaikan hanya pada tahun 2019-2021 sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2022 mengalami penurunan. Sedangkan DBH mengalami kenaikan hanya pada tahun 2020 dan 2021 dan 2017-2019 serta 2022 mengalami penurunan.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan yang dilakukan oleh Pangestu (2022) dan Badrudin dan Pronosokodewo (2019), menemukan bahwa Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya ketika Dana Keistimewaan naik maka kemiskinan akan turun. Namun berbeda dengan hasil penelitian Faosi, dkk (2022) dan Riskha, dkk (2021) bahwa Dana Keistimewaan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut, ditemukan adanya *research gap* mengenai pengaruh Dana Keistimewaan terhadap kemiskinan, oleh karena itu peneliti ingin membuktikan apakah ada pengaruh antara Dana Keistimewaan dan kemiskinan yang terjadi di Provinsi D.I Yogyakarta.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin mencoba meneliti mengenai pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menambah variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel pendukung. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, relevansi penelitian ini adalah menggunakan rentang waktu yang lebih *up to date* yaitu tahun 2017-2022 sehingga lebih relevan terhadap keadaan sekarang, karena adanya perubahan Undang-Undang yang diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Penelitian ini juga menambah variabel dana perimbangan sebagai variabel pendukung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta?
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta?
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta?
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan rekomendasi dan pengarah untuk pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurangi kemiskinan.
2. Bagi civitas akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi untuk pengembangan penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam memahami Dana Keistimewaan serta dana transfer yang diperoleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru dan sebagai syarat memperoleh gelar S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

1. Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka dibuat sebagai pembandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu terdapat landasan teori yang menguraikan berbagai teori, konsep dan anggaran dasar yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Landasan teori menekankan hubungan antara variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab III berisi penjelasan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan peneliti untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan dan menjawab rumusan masalah. Metode penelitian mengandung penjelasan materi penelitian, alat analisis yang digunakan, jalan penelitian, variabel dan data yang akan dikumpulkan serta analisis hasil.

4. Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab IV berisi penjelasan secara deskriptif data setiap variabel yang diteliti dan hasil analisis regresi serta interpretasinya.

5. Bab V Kesimpulan dan Implikasi

Bab V berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian serta pemaparan dan saran mengenai hasil penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pengkajian kembali penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh Dana Keistimewaan terhadap kemiskinan.

Penelitian Farida (2019), “Pengaruh Dana Keistimewaan (DANAIS), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat di DIY Tahun 2014-2017”. Variabel independen yang digunakan yaitu Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan variabel dependen tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel dengan periode penelitian tahun 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan variabel Dana Keistimewaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di DIY. Variabel DAU berpengaruh negatif dan signifikan, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Persamaan penelitian Farida (2019) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen Dana Keistimewaan, DAU dan DAK serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu regresi data panel. Sedangkan perbedaan antara penelitian Farida (2019) dengan penelitian ini yaitu terletak pada penambahan variabel independen, penelitian ini menambah variabel Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada periode penelitian, penelitian Farida (2019) menggunakan periode penelitian tahun 2014-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2017-2022.

Penelitian Faosi, dkk (2022), “Pengaruh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kemiskinan”. Variabel independen yang digunakan yaitu Dana Keistimewaan, dengan variabel dependen persentase penduduk miskin, Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Metode yang digunakan yaitu evaluasi dampak *difference-in-differences* dengan periode penelitian tahun 2010-2019. Hasil penelitian menunjukkan variabel Dana Keistimewaan tidak signifikan terhadap

penurunan kemiskinan di DIY baik dengan ukuran persentase penduduk miskin maupun indeks kedalaman kemiskinan. Sedangkan model yang menggunakan indeks keparahan kemiskinan diabaikan karena tidak memenuhi tes placebo. Persamaan penelitian Faosi, dkk (2022) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen Dana Keistimewaan dan variabel dependen persentase penduduk miskin. Sedangkan perbedaan antara penelitian Faosi, dkk (2022) dengan penelitian ini yaitu terletak pada penambahan variabel independen, penelitian ini menambah variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen, dan metode yang digunakan juga berbeda. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada periode penelitian, penelitian Faosi, dkk (2022) menggunakan periode penelitian tahun 2010-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2017-2022.

Penelitian Riskha, dkk (2021), “Pengaruh Dana Keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Angka Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019”. Variabel independen yang digunakan yaitu Dana Keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan variabel dependen angka kemiskinan. Metode yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan periode penelitian tahun 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan variabel Dana Keistimewaan dan DAK tidak signifikan terhadap angka kemiskinan, sedangkan variabel PAD dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Persamaan penelitian Riskha, dkk (2021) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel Dana Keistimewaan, DAU dan DAK sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan antara penelitian Riskha, dkk (2021) dengan penelitian ini yaitu terletak pada penambahan variabel independen, penelitian ini menambah variabel Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen, dan metode yang digunakan juga berbeda. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada periode penelitian, penelitian Riskha, dkk (2021) menggunakan periode penelitian tahun 2014-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2017-2022.

Penelitian Pangestu (2022), “Analysis Performance of Tax Effort and Privilege Funds Influencing Economy Special Region of Yogyakarta in 2014-2019”. Variabel

independen yang digunakan yaitu Dana Keistimewaan dengan variabel dependen persentase penduduk miskin dan PDRB. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel dengan periode penelitian tahun 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan variabel Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan, dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Persamaan penelitian Pangestu (2022) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel Dana Keistimewaan sebagai variabel independen dan variabel persentase penduduk miskin sebagai variabel dependen, serta menggunakan metode yang sama yaitu regresi data panel. Sedangkan perbedaan antara penelitian Pangestu (2022) dengan penelitian ini yaitu terletak pada penambahan variabel independen, penelitian ini menambah variabel Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada periode penelitian, penelitian Pangestu (2022) menggunakan periode penelitian tahun 2014-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2017-2022.

Penelitian Badrudin dan Pronosokodewo (2019), "The Effect of Privilage Funds on Public Welfare and Poverty in Special District of Yogyakarta". Variabel independen yang digunakan yaitu Dana Keistimewaan dengan variabel dependen kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan. Metode yang digunakan yaitu Partial Last Square dengan periode penelitian tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan variabel Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan,. Persamaan penelitian Badrudin dan Pronosokodewo (2019) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel Dana Keistimewaan sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan antara penelitian Badrudin dan Pronosokodewo (2019) dengan penelitian ini yaitu terletak pada penambahan variabel independen, penelitian ini menambah variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen dan metode yang digunakan juga berbeda. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada periode penelitian, penelitian Badrudin dan Pronosokodewo (2019) menggunakan periode penelitian tahun 2014-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2017-2022.

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Farida (2019), “Pengaruh Dana Keistimewaan (DANAIS), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat di DIY Tahun 2014-2017”.	- Variabel Independen: Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. - Metode penelitian: regresi data panel.	- Variabel Independen: Dana Bagi Hasil. - Periode penelitian: 2017-2022.	Dana Keistimewaan berpengaruh positif dan signifikan, DAU berpengaruh negatif dan signifikan dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di DIY.
2.	Faosi, dkk (2022), “Pengaruh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kemiskinan”.	- Variabel Independen: Dana Keistimewaan. - Variabel dependen: Persentase Penduduk Miskin.	- Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. - Metode Penelitian: regresi data panel. - Periode penelitian: 2017-2022.	Dana Keistimewaan tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di DIY baik dengan ukuran persentase penduduk miskin maupun indeks kedalaman kemiskinan.
3.	Riskha, dkk (2021) “Pengaruh Dana Keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Angka Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019”.	- Variabel Independen: Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.	- Variabel Independen: Dana Bagi Hasil. - Metode Penelitian: regresi data panel. - Periode penelitian: 2017-2022.	Dana Keistimewaan dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY. PAD dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY.

4.	Pangestu (2022), “Analysis Performance of Tax Effort and Privilage Funds Influencing Economy of Special Region of Yogyakarta in 2014-2019”.	- Variabel Independen: Dana Keistimewaan. - Variabel dependen: Persentase Penduduk Miskin. - Metode Penelitian: regresi data panel	- Variabel Independen: Dana Bagi Hasil. - Periode penelitian: 2017-2022.	Dana Keistimewaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan di DIY dan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di DIY.
5.	Badrudin dan Pronosokodewo (2019) “The Effect of Privilage Funds on Public Welfare and Poverty in Special District of Yogyakarta”	- Variabel Independen: Dana Keistimewaan.	- Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. - Metode Penelitian: regresi data panel. - Periode penelitian: 2017-2022.	Dana Keistimewaan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di DIY.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kemiskinan

2.2.1.1. Konsep Dasar Kemiskinan

Kemiskinan secara global didefinisikan sebagai bentuk ketidak sanggupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Pada dasarnya setiap negara termasuk Indonesia memiliki perbedaan dalam mendefinisikan individu atau masyarakat yang dikategorikan miskin. Perbedaan definisi miskin bersifat relatif pada setiap negara, misalnya dilihat dari kondisi ekonomi, tingkat kesejahteraan dan kondisi sosial (Jacobus, dkk, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kriteria kemiskinan didasarkan pada jumlah uang yang dikeluarkan untuk mengonsumsi makanan, yaitu 2100 kalori satu orang per hari dan konsumsi non makanan. Ukuran tersebut berlaku untuk semua karakteristik fisik dan non fisik yang berlaku dan biasanya disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang tidak mencapai garis kemiskinan dikatakan miskin.

Menurut Todaro (2011), Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan besarnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mencerminkan kehidupan yang layak pada masyarakat. Kemiskinan relatif merupakan konsep kemiskinan yang standarnya diukur dengan membandingkan keadaan suatu kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat.

2.2.1.2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan memiliki 4 bentuk yang didasarkan pada kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional (Suryawati, 2004). Keempat bentuk permasalahan tersebut yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan seseorang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemiskinan ini paling banyak digunakan sebagai konsep untuk mengukur kriteria individu masyarakat yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang terjadi karena jumlah pendapatan yang diperoleh jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya relatif rendah, akan tetapi jumlah pendapatan tersebut mencapai garis kemiskinan.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh sulitnya masyarakat dalam memperoleh akses sumber daya yang disebabkan oleh pembangunan yang belum merata.

4. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan kondisi yang berkaitan dengan kebutuhan seseorang dalam masyarakat. Kemiskinan ini terjadi karena sikap dan kebiasaan individu atau masyarakat yang umumnya tidak mau untuk memperbaiki kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak lain yang ingin membantunya. Kebiasaan tersebut dapat berupa sikap malas untuk bekerja dan lebih

mengandalkan bantuan dari orang lain, kurangnya kreativitas dalam bekerja, dan masih banyak masyarakat yang melakukan pemborosan.

Kemiskinan juga memiliki beberapa jenis berdasarkan sifatnya, beberapa jenis tersebut yaitu:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang terjadi karena kelangkaan sumber daya dan minimnya prasarana umum (listrik, jalan raya dan air bersih) serta keadaan tanah yang kurang subur, fenomena tersebut diakibatkan karena belum meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga daerah tersebut menjadi tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan merupakan kemiskinan yang terjadi karena adanya diskriminasi sistem pembangunan yang membuat masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang merata. Kemiskinan ini juga merupakan dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang yang mengakibatkan pembagian hasil-hasil pembangunan menjadi tidak merata akibat fokus utamanya hanya kepada sektor industri dan pertanian.

2.2.1.3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (1997), faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan antara lain:

1. Adanya perbedaan dalam kesempatan untuk memperoleh sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Masyarakat miskin biasanya memiliki sumber daya dengan jumlah terbatas dan kualitas yang rendah.
2. Tingkat sumber daya yang rendah akan mengakibatkan kecilnya produktivitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat upah yang didapatkan. Kualitas pendidikan yang dimiliki penduduk miskin biasanya rendah sehingga sumber daya manusianya juga rendah, selain itu masyarakat miskin banyak yang memiliki nasib kurang beruntung.
3. Adanya perbedaan akses dalam modal.

Menurut Ginanjar (1996), ada 4 penyebab utama kemiskinan yaitu:

1. Tingkat kesehatan rendah. Kesehatan dan gizi yang rendah akan menyebabkan daya tahan tubuh dan kemampuan untuk berfikir menjadi rendah.
2. Tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga akses lapangan pekerjaan menjadi terbatas.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Lapangan kerja yang terbatas akan menyebabkan masyarakat susah untuk memperoleh pekerjaan, hal tersebut juga diperberat apabila masyarakat memiliki pendidikan dan kesehatan yang rendah.
4. Kondisi sosial. Banyak penduduk yang menjadi miskin secara ekonomi karena berada pada daerah yang terpencil dan akses untuk menuju daerah tersebut sulit bahkan tidak dapat dijangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan faktor-faktor lain untuk menunjang kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya. Penduduk juga sulit untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan dengan daerah lainnya.

2.2.1.4. Strategi dan Kebijakan Penurunan Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith (2015), strategi untuk mengentaskan kemiskinan yang efisien, yaitu melalui transfer yang diberikan secara langsung untuk masyarakat dan subsidi dengan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Transfer dan bantuan yang diberikan langsung untuk masyarakat harus dipastikan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan atau miskin.
2. Masyarakat penerima bantuan tidak tergantung pada bantuan tersebut, tetapi dapat termotivasi untuk mempergunakan bantuan tersebut dalam mengembangkan aset agar keluar dari kemiskinan.

Menurut Nafziger (2005) dalam *Economic Development*, terdapat 2 strategi untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu:

1. Peningkatan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan investasi modal manusia, karena modal manusia sangat penting untuk memperoleh pendapatan yang layak. Investasi modal manusia bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat miskin.

2. Pemberian modal dan perkreditan karena masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat miskin adalah kesulitan untuk mengakses permodalan dan sumber perkreditan.

2.2.2. Dana Keistimewaan (DAIS)

Dana Keistimewaan merupakan dana yang diperoleh dari Bagian anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer keuangan daerah sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keistimewaan D.I Yogyakarta. Negara mengakui serta menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa D.I Yogyakarta merupakan provinsi yang mempunyai hak keistimewaan untuk mengurus urusan pemerintahan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada angka 2 juga dijelaskan bahwa keistimewaan merupakan kedudukan hukum yang dimiliki D.I Yogyakarta berdasarkan sejarah dan asal usulnya. Dana Keistimewaan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai Kewenangan Khusus D.I Yogyakarta berdasarkan UUK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan sesuai kewenangan yang dijelaskan dalam UUK Nomor 13 Tahun 2012 pasal 7 meliputi 5 urusan pokok antara lain:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
3. Kebudayaan.
4. Pertahanan.
5. Tata ruang.

2.2.2.1. Tujuan Dana Keistimewaan

Tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dijelaskan dalam UUK Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5, yaitu:

1. Mencapai pemerintahan yang demokratis.
2. Mencapai kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan ketertiban masyarakat yang menjamin kesatuan dalam keberagaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Membangun pemerintahan yang baik.
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kerajaan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lain yang sudah didanai sumber lain. Kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuan atau target dari Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta secara umum digambarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 yaitu mendorong terwujudnya visi D.I Yogyakarta. Visi misi D.I Yogyakarta yaitu “mewujudkan D.I Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera pada tahun 2025”.

2.2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU HKPD Pasal 1 ayat 71, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU merupakan dana transfer yang bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant* yang tercermin dalam UU HKPD Pasal 130 ayat 2, yang mengatur bahwa penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

Penetapan Dana Alokasi Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No.55 yaitu sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan bersih dalam negeri yang kemudian akan disalurkan sebesar 90% untuk kabupaten/Kota dan 10% untuk provinsi. Formulasi DAU:

$DAU = AD + CF$

DAU = Dana Alokasi Umum
 AD = Alokasi Dasar (Gaji PNS Daerah)
 CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\beta_1 \text{IP} + \beta_2 \text{IW} + \beta_3 \text{IPM} + \beta_4 \text{IKK} + \beta_5 \text{IPDRB/kap})$$

KbF = Kebutuhan Fiskal
 TBR = Total Belanja Rata-Rata APBD
 IP = Indeks Jumlah Penduduk
 IW = Indeks Luas Wilayah
 IPM = Indeks Pembangunan Manusia
 IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
 IPDRB/kap = Indeks Produk Regional Bruto Per Kapita
 β = Bobot Indeks

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

KpF = Kapasitas Fiskal
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak
 DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

2.2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU HKPD Pasal 1 ayat 72, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Penetapan DAK oleh pemerintah harus memenuhi kriteria tertentu yaitu:

1. Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Kriteria khusus, ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, ditetapkan langsung oleh kementerian negara/departemen teknis.

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa DAK bertujuan untuk daerah yang terpilih untuk tujuan khusus, sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional. Kebutuhan khusus dalam DAK yaitu:

1. Kebutuhan sarana dan prasarana bagi daerah terpencil yang tidak memiliki akses memadai.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana bagi daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan sarana dan prasarana bagi daerah pesisir/kepulauan yang memiliki sarana dan prasarana kurang memadai.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi dua jenis yaitu DAK Fisik dan DAK NonFisik. DAK Fisik diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang memiliki beberapa jenis yaitu:

1. DAK reguler. DAK ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat dan melakukan pemerataan ekonomi.
2. DAK afirmasi. DAK ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah pesisir, perbatasan dan daerah tertinggal.
4. DAK penugasan. DAK ini bertujuan untuk menjamin tercapainya prioritas atau tujuan nasional.

DAK Fisik mendanai beberapa bidang diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Berbeda dengan DAK NonFisik, yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi publik yang penggunaannya telah ditentukan daerah untuk mendanai program, kegiatan dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung operasional layanan publik.

2.2.5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU HKPD Pasal 1 ayat 70, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar Pemerintah dan

Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Pengalokasian DBH memiliki dua prinsip yaitu:

1. Prinsip *by origin*. DBH dibagi berdasarkan ketentuan bahwa daerah penghasil memperoleh bagian lebih besar dari daerah lain yang bukan merupakan daerah penghasil.
2. Prinsip *Based on Actual Revenue*. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi menjadi dua jenis yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau, sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, pertambangan gas dan panas bumi, serta perikanan.

2.2.6. Pengaruh Antar Variabel

2.2.6.1. Pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) Terhadap Kemiskinan

Pengalokasian Dana Keistimewaan (DAIS) tentu memiliki tujuan tertentu, salah satu tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat. Dana Keistimewaan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DIY dalam beberapa program dan kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan dan kesehatan, pemeliharaan budaya dan tradisi serta pengembangan sektor ekonomi lokal yang akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

2.2.6.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan

Menurut Sidik dalam Kuncoro (2004), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan khusus kepada pemerintah daerah berdasarkan kesenjangan fiskal. DAU mampu membangun perekonomian daerah melalui implementasi kebijakan yang mempertimbangkan potensi daerah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

2.2.6.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan

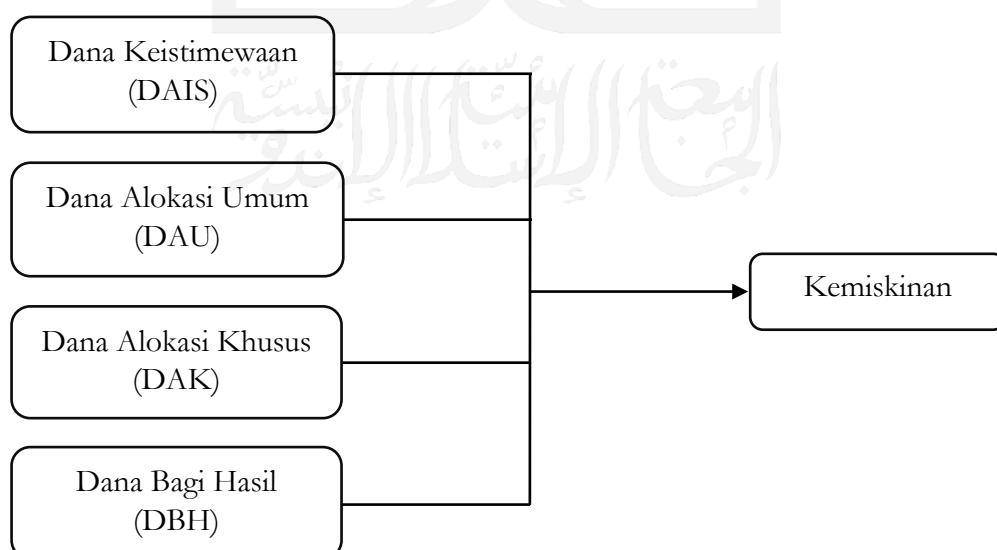
Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk meningkatkan akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh hak-hak dasar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program-program ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan. DAK yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, karena semakin besar bantuan untuk pembangunan dan perbaikan, maka masyarakat miskin akan memperoleh berbagai potensi untuk mengembangkan sumber daya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

2.2.6.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Kemiskinan

Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk membantu pemerintah mengatasi kesenjangan pendapatan antar daerah, oleh karena itu DBH digunakan untuk melakukan kegiatan atau program pembangunan seperti peningkatan sarana dan prasarana publik. DBH juga berperan penting untuk merealisasikan program ekonomi dengan mengoptimalkan potensi daerah, sehingga berdampak langsung pada upaya pengentasan kemiskinan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang ada, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan pernyataan atau dugaan sementara yang belum memiliki jawaban terferivikasi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang ada maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Dana Keistimewaan (DAIS) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
4. Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dan biasanya data ini merupakan data yang sudah siap pakai (Widarjono, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel. Data panel merupakan gabungan data *times series* dan *cross section*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Kemiskinan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2022 yang bersumber dari persentase penduduk miskin Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Satuan yang digunakan adalah persen.
2. Data Dana Keistimewaan (DAIS) 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2022 yang bersumber dari keistimewaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) D.I Yogyakarta. Satuan yang digunakan adalah juta rupiah.
3. Data Dana Alokasi Khusus (DAU) 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2022 yang bersumber dari dana perimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) D.I Yogyakarta. Satuan yang digunakan adalah juta rupiah.
4. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2022 yang bersumber dari dana perimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) D.I Yogyakarta. Satuan yang digunakan adalah juta rupiah.
5. Data Dana Bagi Hasil (DBH) 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017-2022 yang bersumber dari dana perimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) D.I Yogyakarta. Satuan yang digunakan adalah juta rupiah.

3.2. Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menerima pengaruh atau yang dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan yang diukur melalui persentase penduduk miskin. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal layak bagi kehidupan seperti makanan yang dikonsumsi dan rumah tempat tinggal.

3.2.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

1. Dana Keistimewaan (DAIS)

Dana Keistimewaan (DAIS) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan D.I Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

3.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan teknik analisis data yang menggabungkan data *time series* dengan *cross section*. Data panel merupakan data hasil pengamatan yang dilakukan secara terus menerus terhadap data *cross section* pada waktu yang berbeda untuk subjek yang sama, sehingga dapat memperoleh penjelasan tentang perilaku beberapa objek tersebut selama periode waktu tertentu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program Eviews 10. Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Model regresi data panel dalam penelitian ini yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y	: Kemiskinan (persen)
X ₁	: Dana Keistimewaan (juta rupiah)
X ₂	: Dana Alokasi Umum (DAU) (juta rupiah)
X ₃	: Dana Alokasi Khusus (DAK) (juta rupiah)
X ₄	: Dana Bagi Hasil (DBH) (juta rupiah)
$\beta_0 \beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	: Koefisien Regresi Variabel Independen
i	: Kabupaten/Kota (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta)
t	: Waktu (2017-2022)
e	: Standar Error

3.3.1. Estimasi Regresi Data Panel

Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

3.3.1.1. Common Effect

Common Effect adalah metode estimasi yang menggabungkan informasi deret waktu dan informasi lintas area untuk mengevaluasi informasi dengan menggunakan strategi *Standard Least Square (OLS)* untuk mengukur model.

3.3.1.2. Fixed Effect

Fixed Effect adalah pendekatan yang berfokus pada heterogenitas unit lintas segmen dalam model pengulangan informasi papan dengan memungkinkan nilai cakupan yang berbeda untuk setiap unit lintas segmen sambil menerima kemiringan yang konsisten.

3.3.1.3. Random Effect

Random Effect adalah metode penambahan variabel palsu/dummy ke dalam model, yang dapat mengurangi jumlah tingkat peluang sehingga mengurangi produktivitas garis depan yang sedang dievaluasi.

3.3.2. Pemilihan Model

Untuk memilih model yang paling tepat dilakukan beberapa pengujian, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM).

3.3.2.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan dalam regresi data panel untuk mengetahui antara *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang baik digunakan. Asumsi dalam Uji Chow yaitu:

H_0 : *Common Effect* yang baik digunakan

H_a : *Fixed Effect* yang baik digunakan

Jika hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Chi-square melebihi signifikansi (α), maka model yang baik digunakan adalah *Common Effect*. Sebaliknya, jika probabilitas Chi-square dibawah signifikansi (α), maka model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*. Jika model yang terpilih adalah *Random Effect*, maka dilakukan uji tambahan yaitu Uji Hausman. Uji Hausman bertujuan untuk menilai kesesuaian antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang baik digunakan.

3.3.2.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan pada regresi data panel untuk mengetahui antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang baik digunakan. Asumsi dalam Uji Hausman yaitu:

H_0 : *Random Effect* yang baik digunakan

H_a : *Fixed Effect* yang baik digunakan

Jika hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Cross-section melebihi signifikansi (α), maka model yang baik digunakan adalah *Random Effect*. Sebaliknya, jika probabilitas Cross-section dibawah signifikansi (α), maka model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*. Apabila model yang terpilih adalah *Random Effect*, maka dilakukan uji tambahan yaitu Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji LM bertujuan untuk menilai kesesuaian antara *Common Effect* atau *Random Effect* yang baik digunakan.

3.3.2.3. Uji LM

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan pada regresi data panel untuk mengetahui antara *Common Effect* atau *Random Effect* yang baik digunakan. Asumsi dalam Uji LM yaitu:

H_0 : *Common Effect* yang baik digunakan

H_a : *Random Effect* yang baik digunakan

Uji LM didasarkan pada distribusi chi-square dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah variabel independen. Jika hasil uji menunjukkan nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis untuk statistik chi-square maka model yang baik digunakan adalah *Random Effect*. Sebaliknya, jika nilai statistik LM lebih kecil dari nilai kritis maka model yang baik digunakan adalah *Common Effect*.

3.4. Uji Statistik

3.4.1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika nilai probabilitas F statistik kurang dari tingkat signifikansi (α), maka artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari tingkat signifikansi (α), maka artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis uji-f adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.2. Uji Parsial T

Uji parsial t atau uji t merupakan prosedur yang menggunakan hasil sampel untuk menguji kebenaran hipotesis nol. Uji-t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji-t dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen. Jika nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka hipotesis nol ditolak yang artinya variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari tingkat signifikansi (α), maka gagal menolak hipotesis nol yang artinya variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis uji-t adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta > 0$, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.3. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi atau R-squared digunakan untuk mengetahui seberapa baik garis regresi menjelaskan data (*goodness of fit*). Jika semua data terletak pada garis regresi atau dengan kata lain semua nilai residu nol, maka dapat diartikan bahwa garis regresi tersebut sempurna. Namun garis regresi yang sempurna tersebut jarang sekali terjadi. Secara umum, $\hat{e}_i$ bisa positif atau negatif. Jika hal tersebut terjadi, berarti garis regresinya tidak 100% sempurna. Namun diharapkan mendapatkan garis regresi yang

membuat $\hat{e}_i$ sekecil mungkin. Nilai R-squared menunjukkan bahwa semakin besar angka yang diperoleh, maka semakin baik model yang dibuat begitupun sebaliknya, jika nilai R-squared kecil maka semakin tidak baik model yang dibuat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta dan BAPPEDA D.I Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data panel 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017-2022 dengan objek penelitian 4 Kabupaten yaitu Bantul, Gunung kidul, Kulon Progo, Sleman dan 1 kota yaitu Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Kemiskinan sebagai variabel dependen yang diukur dengan persentase penduduk miskin, dan menggunakan Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel independen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Pendekatan analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode data panel dengan menggunakan Eviews 10.

4.2. Statistik Deskriptif

Data statistik deskriptif mendeskripsikan data penelitian yang diperoleh melalui nilai rata-rata (mean), deviasi standar, nilai tengah (median), nilai tertinggi (maximum), dan nilai terendah (minimum).

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

	KEMISKINAN	DAIS	DAU	DAK	DBH
Mean	12,74700	55.131,14	822.653,8	268.307,2	49.797,30
Median	13,46500	42.478,20	892.298,4	288..233,2	34.815,21
Maximum	20,03000	272.529,8	1.035.862	437.902,0	264.686,4
Minimum	6,620000	7.360,240	381.278,3	60.035,69	13.057,00
Std. Dev.	4,666577	53.488,56	165.353,8	93.965,47	55.469,29
Observations	30	30	30	30	30

Sumber: Lampiran II. Analisis Deskriptif

Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif bahwa baik variabel dependen atau variabel independen memiliki nilai *mean* yang lebih besar daripada nilai standar deviasi, ini menunjukkan bahwa data tersebut relatif bersifat homogen atau tidak bervariasi. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah observasi untuk 5 Kabupaten/Kota selama 2017-2022 berjumlah 30 observasi (5 *Cross Section* dan 6 *Times Series*).

Nilai rata-rata yang diperoleh variabel kemiskinan selama 2017-2022 sebesar 12,75% dengan nilai tertinggi sebesar 20,03% yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo dan nilai terendah sebesar 6,62% yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta.

Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Dana Keistimewaan (DAIS) sebesar 55.131,14 juta rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 272.529,8 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan nilai terendah sebesar 7.360,24 juta rupiah yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Berdasarkan data BAPPEDA DIY diketahui bahwa anggaran Dana Keistimewaan (DAIS) lebih banyak digunakan untuk urusan kebudayaan setiap tahunnya, sehingga anggaran tersebut difokuskan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten/Kota dan belum diarahkan sepenuhnya untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Keistimewaan tahun Anggaran 2022 pada 14 April 2023, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa Dana Keistimewaan terealisasi sebesar 98,27%. Dana tersebut dialokasikan pada kegiatan-kegiatan seperti sejarah permuseuman, pelestarian budaya dan cagar budaya, kelestarian dan penyaluran sarana dan prasarana urusan kebudayaan, tradisi budaya dan seni budaya, dan pengelolaan taman budaya. Dana yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan tersebut belum diarahkan sepenuhnya untuk mengurangi kemiskinan melainkan untuk melestarikan kebudayaan yang ada, sehingga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Faosi, dkk (2022), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 822.653,8 juta rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 1.035.862 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan nilai terendah sebesar 381.278,3 juta rupiah yang

dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo. Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik daerah. Berdasarkan catatan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman, DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai operasional daerah dan belanja daerah yang tidak berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, seperti belanja pegawai, sehingga DAU yang ada tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Isramiwarti, dkk (2017), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar 268.307,2 juta rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 437.902,0 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul dan nilai terendah sebesar 60.035,69 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman. Dana Alokasi Khusus (DAK) didistribusikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK Fisik mendanai beberapa bidang diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan, sedangkan DAK NonFisik dialokasikan untuk membantu operasionalisasi publik sehingga DAK dapat menurunkan kemiskinan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Fitriyanti dan Handayani (2020), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Nilai rata-rata yang diperoleh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar 49.797,30 juta rupiah dengan nilai tertinggi sebesar 264.686,4 juta rupiah dan nilai terendah sebesar 13.057,00 juta rupiah yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul. Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah dengan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Gunungkidul, belanja daerah di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada untuk belanja yang lainnya seperti belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sehingga program dan kebijakan dalam rangka peningkatan pemerataan wilayah belum optimal. Hal tersebut menyebabkan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan

kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Isramiwarti, dkk (2017), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan atau tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

4.3. Hasil Analisis dan pembahasan

4.3.1. Estimasi Regresi Data Panel

Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

Tabel 4.2 *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13,55550	4,286506	3,162365	0,0041
DAIS	1,44E-05	1,63E-05	0,880201	0,3871
DAU	-1,21E-05	6,32E-06	-1,916602	0,0668
DAK	3,02E-05	1,16E-05	2,603654	0,0153
DBH	5,48E-06	1,51E-05	0,363036	0,7196
R-squared	0,223845			
Adjusted R-squared	0,099660			
F-statistic	1,802515			
Prob(F-statistic)	0,159926			

Sumber: Lampiran III. *Common Effect*

Tabel 4.3 *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12,12293	1,846512	6,565315	0,0000
DAIS	-1,12E-06	3,08E-06	-0,365244	0,7186
DAU	2,06E-06	2,04E-06	1,007478	0,3252
DAK	-5,10E-06	2,24E-06	-2,277783	0,0333
DBH	7,29E-06	2,59E-06	2,812866	0,0104
R-squared	0,985205			
Adjusted R-squared	0,979569			
F-statistic	174,8027			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Lampiran IV. *Fixed Effect*

Tabel 4.4 *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13,55550	0,64572	20,99288	0,0000
DAIS	1,44E-05	2,46E-06	5,843082	0,0000
DAU	-1,21E-05	9,52E-07	-12,72307	0,0000
DAK	3,02E-05	1,75E-06	17,28396	0,0000
DBH	5,48E-06	2,28E-06	2,409956	0.0236
R-squared	0,223845			
Adjusted R-squared	0,099660			
F-statistic	1,802515			
Prob(F-statistic)	0,159926			

Sumber: Lampiran V. *Random Effect*

4.3.2. Pemilihan Model Regresi

4.3.2.1. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk mengetahui antara *common effect* atau model *fixed effect* yang baik digunakan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect* yang baik digunakan

H_a : *Fixed Effect* yang baik digunakan

Untuk melakukan uji pemilihan model dengan *common effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat p-value. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau signifikan maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau tidak signifikan maka model yang digunakan adalah *Common Effect*.

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	270.172.894	-4,21	0,0000
Cross-section Chi-square	118.802.389	4	0,0000

Sumber: Lampiran VI. Hasil Uji Chow

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.5, diketahui bahwa nilai statistic Chi-Square adalah sebesar 118.802.389 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ sehingga menolak H_0 atau signifikan. Berdasarkan hasil Uji Chow disimpulkan

bahwa model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*. Kemudian dilakukan Uji Hausman yaitu pengujian untuk mengetahui antara *fixed effect* atau *random effect* yang paling baik digunakan.

4.3.2.2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui antara *fixed effect* atau *random effect* yang baik digunakan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect* yang baik digunakan

H_a : *Fixed Effect* yang baik digunakan

Untuk melakukan uji pemilihan model dengan *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat p-value. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau signifikan maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau tidak signifikan maka model yang digunakan adalah *Random Effect*.

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.080.691.575	4	0,0000

Sumber: Lampiran VII. Hasil Uji Hausman

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.6, diketahui bahwa nilai statistic Chi-Square adalah sebesar 1080.691575 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ sehingga menolak H_0 atau signifikan. Berdasarkan hasil Uji Hausman disimpulkan bahwa model yang baik digunakan adalah *Fixed Effect*.

4.4. Model Regresi Terbaik

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman, dapat diketahui bahwa model yang baik digunakan yaitu *Fixed Effect* dengan model regresi sebagai berikut:

$$K_{it} = 12,123 + -1,12E-06DAIS_{it} + 2,06E-06DAU_{it} + -5,10E-06DAK_{it} + 7,29E-06DBH_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

K : Kemiskinan (Persen)

DAIS	: Dana Keistimewaan (Juta Rupiah)
DAU	: Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)
DAK	: Dana Alokasi Khusus (DAK) (Juta Rupiah)
DBH	: Dana Bagi Hasil (DBH) (Juta Rupiah)
i	: Kabupaten/Kota (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta)
t	: Waktu (2017-2022)
e	: Standar error

Tabel 4.7 Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12,12293	1,846512	6,565315	0,0000
DAIS	-1,12E-06	3,08E-06	-0,365244	0,7186
DAU	2,06E-06	2,04E-06	1,007478	0,3252
DAK	-5,10E-06	2,24E-06	-2,277783	0,0333
DBH	7,29E-06	2,59E-06	2,812866	0,0104
R-squared	0,985205			
Adjusted R-squared	0,979569			
F-statistic	174,8027			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Lampiran IV. *Fixed Effect*

4.4.1. Uji Statistik

Penelitian ini menggunakan metode uji statistik yang terdiri dari signifikansi simultan (Uji F), uji signifikansi parameter individual (Uji T) dan koefisien determinasi (R-Squared).

4.4.1.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji signifikansi simultan atau Uji F dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan nilai statistik F sebesar 174,803 dengan probabilitas F sebesar $0,000 < \alpha = 5\% (0,05)$ sehingga menolak H_0 , yang artinya variabel Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

4.4.1.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

4.4.1.2.1. Variabel Dana Keistimewaan (DAIS)

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh antara variabel Dana Keistimewaan (DAIS) terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed Effect* pada tabel 4.7, didapatkan nilai koefisien variabel Dana Keistimewaan (DAIS) sebesar $-1,12E-06$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,719 > \alpha = 5\% (0,05)$ sehingga gagal menolak H_0 , yang artinya variabel Dana Keistimewaan (DAIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta.

4.4.1.2.2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed Effect* pada tabel 4.7, didapatkan nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar $2,06E-06$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,325 > \alpha = 5\% (0,05)$ sehingga gagal menolak H_0 , yang artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta.

4.4.1.2.3. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed Effect* pada tabel 4.7, didapatkan nilai koefisien variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar $-5,10E-06$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,033 < \alpha = 5\% (0,05)$ sehingga menolak H_0 , yang artinya variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa ketika Dana Alokasi Khusus (DAK) naik 1 juta rupiah maka kemiskinan akan turun sebesar $0,000000510\%$.

4.4.1.2.4. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH)

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh antara variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed Effect* pada tabel 4.7, didapatkan nilai koefisien variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar $7,29E-06$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,010 < \alpha = 5\% (0,05)$ sehingga menolak H_0 , yang artinya variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa ketika Dana Bagi Hasil (DBH) naik 1 juta rupiah maka kemiskinan akan naik sebesar $0,000000729\%$.

4.4.1.3. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi (R-Squared) merupakan ukuran dari variabel independen untuk menjelaskan variansi variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan nilai R^2 sebesar $0,985$ atau 99% , sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta selama 2017-2022 dapat dijelaskan oleh variabel Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4.2. Pembahasan

4.4.2.1. Pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) Terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis serta uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Keistimewaan (DAIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Variabel Dana Keistimewaan (DAIS) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, hal ini diakibatkan oleh pengalokasian DAIS yang belum maksimal. DAIS di sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta difokuskan pada program-program untuk mendukung pemeliharaan budaya dan tradisi dengan pembentukan Rintisan Kalurahan Budaya. Dana yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan tersebut belum mampu menurunkan kemiskinan, karena kebijakan tersebut belum diarahkan sepenuhnya untuk mengurangi kemiskinan melainkan untuk melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada.

Dana Keistimewaan DAIS juga diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dengan adanya program pengembangan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan pengembangan sektor ekonomi lokal yang disebut dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). BKK yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut ternyata belum maksimal, hal ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan dalam pengalokasiannya, diantaranya yaitu dana yang diberikan tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin, sehingga DAIS tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

Hasil ini didukung oleh penelitian Faosi, dkk (2022), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis serta uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan pengalokasian DAU oleh beberapa daerah, alokasi DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai operasional daerah yang tidak berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga DAU tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu komponen pembiayaan daerah yang diterima oleh 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta selama 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan dengan tren yang meningkat, artinya pemerintah daerah bergantung pada dana yang diperoleh dari pusat untuk membiayai operasional daerahnya. DAU merupakan dana tertinggi yang diterima dibandingkan dengan pendapatan daerah yang lain seperti DAK dan DBH yang digunakan untuk belanja daerah, namun belanja daerah yang dialokasikan DAU lebih banyak digunakan untuk operasional daerah yang tidak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

Hasil ini didukung oleh penelitian Isramiwarti, dkk (2017), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.4.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis serta uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, artinya apabila terjadi peningkatan DAK maka kemiskinan akan menurun.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, hal ini dikarenakan DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan melakukan pembangunan atau perbaikan infrastruktur pada bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah, serta lingkungan hidup. DAK juga digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibuktikan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang fokus pada pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dalam pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada. Potensi daerah yang meningkat atau maksimal akan meningkatkan sumber-sumber pendapatan per kapita setiap daerah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.

Hal ini sejalan dengan tujuan DAK yaitu mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk kebutuhan sarana, prasarana, dan layanan publik yang belum mencapai standar atau untuk mendorong pembangunan daerah, sehingga semakin tinggi DAK yang diberikan kepada daerah maka bantuan pemerintah daerah dalam pemberian layanan publik dan pembangunan daerah akan meningkat sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Namun hal tersebut berarti bahwa kemampuan daerah masih rendah dan mengakibatkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta masih bergantung pada pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan.

Hasil ini didukung oleh penelitian Fitriyanti dan Handayani (2020), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.4.2.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis serta uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, artinya apabila terjadi peningkatan DBH maka kemiskinan akan meningkat.

Variabel Dana Alokasi Bagi Hasil (DBH) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta, hal ini dikarenakan tata kelola DBH yang diterima oleh pemerintah daerah belum sesuai untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga kemiskinan tidak turun secara signifikan.

Pengalokasian DBH kepada setiap daerah bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. DBH yang dialokasikan merupakan satu sumber pendanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur, serta peningkatan layanan publik, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pengalokasian DBH yang optimal akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengentasan kemiskinan, namun realitanya DBH dialokasikan untuk hal-hal yang tidak berpengaruh terhadap usaha penurunan kemiskinan. Pengalokasian DBH banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai yang terlalu besar sehingga program dan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan menjadi terhambat. Hal tersebut yang menjadi penyebab pengaruh DBH terhadap peningkatan kesejahteraan relatif kecil sehingga tidak berdampak besar terhadap penurunan kemiskinan

Hasil ini didukung oleh penelitian Isramiwarti, dkk (2017), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.4.3. Analisis Intersep

Analisis intersep dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel *Cross Section Effect* yang menunjukkan perbedaan masing-masing individu berdasarkan intersep yang didapatkan. Analisis intersep dari setiap Kabupaten/Kota ditampilkan melalui nilai konstanta masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2017-2022. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil estimasi *Cross Section Effect* yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Cross Section Fixed Effect

No.	Kabupaten/Kota	Effect	Coeficien	Intercept
1	Kabupaten Bantul	0,681510	12,12293	12,80444
2	Kabupaten Gunungkidul	4,361271	12,12293	16,48420
3	Kabupaten Kulon Progo	5,762930	12,12293	17,88586
4	Kabupaten Sleman	-5,065426	12,12293	7,057504
5	Kota Yogyakarta	-5,740286	12,12293	6,382644

Sumber: Lampiran VIII. *Cross Section Fixed Effect*

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa Provinsi D.I Yogyakarta mempunyai 4 kabupaten dan 1 kota, dan hasil nilai *intercept* yang didapatkan bernilai positif. Hasil *Intercept* tersebut dapat mempengaruhi area tingkat kemiskinan.

1. Nilai intersep Kabupaten Bantul sebesar 12,804 yang berarti bahwa ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai nol maka jumlah kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 12,804 persen.
2. Nilai intersep Kabupaten Gunungkidul sebesar 16,484 yang berarti bahwa ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai nol maka jumlah kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 16,484 persen.
3. Nilai intersep Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,886 yang berarti bahwa ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai nol maka jumlah kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 17,886 persen.
4. Nilai intersep Kabupaten Sleman sebesar 7,058 yang berarti bahwa ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai nol maka jumlah kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 7,058 persen.
5. Nilai intersep Kota Yogyakarta sebesar 6,383 yang berarti bahwa ketika variabel Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai nol maka jumlah kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 6,383 persen.

Jika diurutkan berdasarkan hasil yang diperoleh, Kabupaten Kulon Progo merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai intersep atau tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 17,886, sedangkan Kota Yogyakarta merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai intersep atau tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 6,383.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan juga pembahasan, maka didapat kesimpulan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan satu-satunya dana yang memiliki hasil sesuai dengan hipotesis awal, yaitu berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. DAK didistribusikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan program atau proyek yang sudah dirancang, sehingga pemerintah daerah yang menerima DAK harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Berbeda dengan DAIS, DAU dan DBH, dana tersebut dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dirancang langsung oleh pemerintah pusat berdampak terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah daerah tidak secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan masukan bagi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan Dana Keistimewaan (DAIS), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan lebih baik jika lebih difokuskan pada kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan, karena Provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sesuai dengan UU HKPD yang mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah dengan meletakkan tanggung jawab yang lebih kuat ke

daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan meratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan memiliki kekurangan dalam periode penelitian, penelitian ini hanya menggunakan data 6 tahun terakhir. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian sehingga akan memberikan pertimbangan lain dari penelitian yang telah dilakukan saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6147/5405>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2023). *Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Kabupaten/Kota*. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/705-alokasi-besaran-anggaran-keistimewaan-per-kabupaten-kota
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2023). *Dana Peimbangan*. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/37-dana-perimbangan
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Penjelasan Data Kemiskinan*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2022-2023*. [https://www.archive.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p\)-menurut-provinsi-dan-daerah.html](https://www.archive.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p)-menurut-provinsi-dan-daerah.html)
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2021-2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/142/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badrudin, R., & Pronosokodewo, B. G. (2019). *The Effects of Privilege Funds on Public Welfare*. July, 8–19.
- Faosi, N., & Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A, Ak., C. (2022). *Pengaruh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kemiskinan* [Universitas Gajah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Ecoomics*, 9(2), 192–209.
- Ginanjari, K. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Variabel Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213. <https://pekbis.e.journal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/4634/4418>

- Jacobus, E. H., Kindangaen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP. AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Nafziger, E. W. (2005). *Economic Development*. Cambridge.
- Nur Farida, V. (2019). *Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan (DANAIS), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat di DIY Tahun 2014-2017* [Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta]. <https://eprints.upnyk.ac.id>
- Pangestu, Y. A. (2022). *Analysis Performance of Tax Effort and Privilege Funds Influencing Economy of Special Region of Yogyakarta in 2014-2019*. 15(1), 221–233.
- Riskha, Y., & Hariwibowo P S.E., M.Si., K. D. R. (2021). *Pengaruh Dana Keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Angka Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019* [Universitas Gajah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id>
- Ritonga, A. (2003). *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Suryawati. (2002). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (11th Edition). Addison-Wesley.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39064>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. peraturan.bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)*. peraturan.bpk.go.id. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022#:~:text=Undang-undang \(UU\) ini,UU Nomor 28 Tahun 2009](https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022#:~:text=Undang-undang (UU) ini,UU Nomor 28 Tahun 2009)
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai panduan Eviews* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan (%)	DAIS (Juta Rupiah)	DAU (Juta Rupiah)	DAK (Juta Rupiah)	DBH (Juta Rupiah)
Kabupaten Bantul	2017	14,07	18.654,47	982.250,84	270.134,24	34.871,18
Kabupaten Bantul	2018	13,43	22.815,20	982.250,84	342.620,92	30.584,17
Kabupaten Bantul	2019	12,92	22.475,46	1.015.302,85	315.907,25	19.947,00
Kabupaten Bantul	2020	13,50	19.708,49	923.213,60	308.643,67	35.684,04
Kabupaten Bantul	2021	14,04	51.568,72	911.168,11	300.312,60	41.290,85
Kabupaten Bantul	2022	12,27	30.460,83	902.030,73	344.649,44	34.759,24
Kabupaten Gunungkidul	2017	18,65	26.930,42	938.221,14	283.708,65	264.686,44
Kabupaten Gunungkidul	2018	17,12	33.468,91	938.221,14	303.863,88	20.375,69
Kabupaten Gunungkidul	2019	16,61	175.516,12	965.080,00	342.547,00	13.057,00
Kabupaten Gunungkidul	2020	17,07	87.909,78	882.566,00	327.129,00	21.251,00
Kabupaten Gunungkidul	2021	17,69	50.825,67	868.017,00	437.902,00	223.469,00
Kabupaten Gunungkidul	2022	15,86	40.424,96	865.880,00	424.908,00	26.798,00
Kabupaten Kulon Progo	2017	20,03	44.602,04	705.868,94	210.264,78	25.598,38
Kabupaten Kulon Progo	2018	18,30	56.623,69	705.868,94	247.883,11	19.015,96
Kabupaten Kulon Progo	2019	17,39	26.895,85	732.088,72	293.857,45	13.322,29
Kabupaten Kulon Progo	2020	18,01	102.452,76	381.278,29	111.028,54	13.282,42
Kabupaten Kulon Progo	2021	18,38	39.653,96	648.511,05	292.757,78	23.146,06
Kabupaten Kulon Progo	2022	16,39	62.620,12	643.983,39	245.290,82	23.146,06
Kabupaten Sleman	2017	8,13	16.615,12	996.492,45	278.580,35	60.499,72
Kabupaten Sleman	2018	7,65	20.771,87	996.492,45	321.540,11	50.685,43
Kabupaten Sleman	2019	7,41	24.101,46	1.035.862,07	301.566,95	33.935,96
Kabupaten Sleman	2020	8,12	44.531,43	938.351,45	273.628,32	59.203,53
Kabupaten Sleman	2021	8,64	272.529,79	925.964,57	60.035,69	70.483,82
Kabupaten Sleman	2022	7,74	107.644,02	921.381,95	430.769,69	58.936,14
Kota Yogyakarta	2017	7,64	7.360,24	658.504,19	170.562,68	40.347,46
Kota Yogyakarta	2018	6,98	25.695,64	658.504,19	162.523,89	44.728,93
Kota Yogyakarta	2019	6,84	48.388,32	700.372,56	145.960,29	27.070,84
Kota Yogyakarta	2020	7,27	53.712,36	627.247,17	142.634,30	48.878,98
Kota Yogyakarta	2021	7,64	68.085,76	617.524,29	131.991,30	60.265,83
Kota Yogyakarta	2022	6,62	50.890,66	611.115,72	226.012,14	54.597,64

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bappeda D.I Yogyakarta 2024 (Diolah)

Lampiran II. Statistika deskriptif

Date: 01/10/24
Time: 14:27
Sample: 2017 2022

	KEMISKINAN	DAIS	DAU	DAK	DBH
Mean	12.74700	55131.14	822653.8	268307.2	49797.30
Median	13.46500	42478.20	892298.4	288233.2	34815.21
Maximum	20.03000	272529.8	1035862.	437902.0	264686.4
Minimum	6.620000	7360.240	381278.3	60035.69	13057.00
Std. Dev.	4.666577	53488.56	165353.8	93965.47	55469.29
Skewness	-0.041765	2.705379	-0.694012	-0.284660	3.046445
Kurtosis	1.379052	10.78850	2.633224	2.652248	11.50394
Jarque-Bera	3.293063	112.4214	2.576420	0.556320	136.8005
Probability	0.192717	0.000000	0.275764	0.757175	0.000000
Sum	382.4100	1653934.	24679615	8049215.	1493919.
Sum Sq. Dev.	631.5312	8.30E+10	7.93E+11	2.56E+11	8.92E+10
Observations	30	30	30	30	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran III. *Common Effect*

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/10/24 Time: 14:38
 Sample: 2017 2022
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.55550	4.286506	3.162365	0.0041
DAIS	1.44E-05	1.63E-05	0.880201	0.3871
DAU	-1.21E-05	6.32E-06	-1.916602	0.0668
DAK	3.02E-05	1.16E-05	2.603654	0.0153
DBH	5.48E-06	1.51E-05	0.363036	0.7196
R-squared	0.223845	Mean dependent var		12.74700
Adjusted R-squared	0.099660	S.D. dependent var		4.666577
S.E. of regression	4.427939	Akaike info criterion		5.964757
Sum squared resid	490.1662	Schwarz criterion		6.198290
Log likelihood	-84.47136	Hannan-Quinn criter.		6.039467
F-statistic	1.802515	Durbin-Watson stat		0.427252
Prob(F-statistic)	0.159926			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran IV. *Fixed Effect*

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/10/24 Time: 14:33
 Sample: 2017 2022
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.12293	1.846512	6.565315	0.0000
DAIS	-1.12E-06	3.08E-06	-0.365244	0.7186
DAU	2.06E-06	2.04E-06	1.007478	0.3252
DAK	-5.10E-06	2.24E-06	-2.277783	0.0333
DBH	7.29E-06	2.59E-06	2.812866	0.0104

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.985205	Mean dependent var	12.74700
Adjusted R-squared	0.979569	S.D. dependent var	4.666577
S.E. of regression	0.667024	Akaike info criterion	2.271345
Sum squared resid	9.343350	Schwarz criterion	2.691704
Log likelihood	-25.07017	Hannan-Quinn criter.	2.405821
F-statistic	174.8027	Durbin-Watson stat	1.800918
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran V. *Random Effect*

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/10/24 Time: 14:35
 Sample: 2017 2022
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 30
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.55550	0.645719	20.99288	0.0000
DAIS	1.44E-05	2.46E-06	5.843082	0.0000
DAU	-1.21E-05	9.52E-07	-12.72307	0.0000
DAK	3.02E-05	1.75E-06	17.28396	0.0000
DBH	5.48E-06	2.28E-06	2.409956	0.0236
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.01E-06	0.0000
Idiosyncratic random			0.667024	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.223845	Mean dependent var		12.74700
Adjusted R-squared	0.099660	S.D. dependent var		4.666577
S.E. of regression	4.427939	Sum squared resid		490.1662
F-statistic	1.802515	Durbin-Watson stat		0.427252
Prob(F-statistic)	0.159926			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.223845	Mean dependent var		12.74700
Sum squared resid	490.1662	Durbin-Watson stat		0.427252

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran VI. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: CEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	270.172894	(4,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	118.802389	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 01/10/24 Time: 14:39
Sample: 2017 2022
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.55550	4.286506	3.162365	0.0041
DAIS	1.44E-05	1.63E-05	0.880201	0.3871
DAU	-1.21E-05	6.32E-06	-1.916602	0.0668
DAK	3.02E-05	1.16E-05	2.603654	0.0153
DBH	5.48E-06	1.51E-05	0.363036	0.7196
R-squared	0.223845	Mean dependent var		12.74700
Adjusted R-squared	0.099660	S.D. dependent var		4.666577
S.E. of regression	4.427939	Akaike info criterion		5.964757
Sum squared resid	490.1662	Schwarz criterion		6.198290
Log likelihood	-84.47136	Hannan-Quinn criter.		6.039467
F-statistic	1.802515	Durbin-Watson stat		0.427252
Prob(F-statistic)	0.159926			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran VII. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1080.691575	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
DAIS	-0.000001	0.000014	0.000000	0.0000
DAU	0.000002	-0.000012	0.000000	0.0000
DAK	-0.000005	0.000030	0.000000	0.0000
DBH	0.000007	0.000005	0.000000	0.1455

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/10/24 Time: 14:36

Sample: 2017 2022

Periods included: 6

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.12293	1.846512	6.565315	0.0000
DAIS	-1.12E-06	3.08E-06	-0.365244	0.7186
DAU	2.06E-06	2.04E-06	1.007478	0.3252
DAK	-5.10E-06	2.24E-06	-2.277783	0.0333
DBH	7.29E-06	2.59E-06	2.812866	0.0104

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.985205	Mean dependent var	12.74700
Adjusted R-squared	0.979569	S.D. dependent var	4.666577
S.E. of regression	0.667024	Akaike info criterion	2.271345
Sum squared resid	9.343350	Schwarz criterion	2.691704
Log likelihood	-25.07017	Hannan-Quinn criter.	2.405821
F-statistic	174.8027	Durbin-Watson stat	1.800918
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 10

Lampiran VIII. Cross Section Fixed Effect

	KABUPATEN_KOTA	Effect
1	Kabupaten Bantul	0.681510
2	Kabupaten Gunungkidul	4.361271
3	Kabupaten Kulon Progo	5.762930
4	Kabupaten Sleman	-5.065426
5	Kota Yogyakarta	-5.740286

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 10

